

KAJIAN KONFLIK AGRARIA TANAMALIA

Sengketa Ruang Hidup di Antara Warisan PLTA Larona, Kebun Lada Rakyat, dan Ekspansi Tambang Nikel di Luwu Timur

Disusun berdasarkan penelusuran dan verifikasi silang multi-sumber, September 2026

RINGKASAN EKSEKUTIF

Konflik agraria di Blok Tanamalia, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, adalah sengketa ruang antara PT Vale Indonesia Tbk (pemegang IUPK dan Persetujuan Pinjam Pakai Kawasan Hutan/PPKH No. 885 Tahun 2025) dengan ribuan petani lada (merica) yang telah mengelola kawasan tersebut secara turun-temurun. Konflik ini tidak berdiri sendiri, melainkan mata rantai dari sejarah kehilangan ruang hidup masyarakat Loeha Raya yang bermula sejak pembangunan PLTA Larona pada 1979. Dokumen ini menyusun kronologi, memverifikasi klaim-klaim kunci dari berbagai sumber (termasuk sumber yang saling bertentangan), dan menganalisis akar struktural konflik serta opsi penyelesaiannya.

Temuan Utama:

1. Konflik memiliki akar historis berlapis — dimulai dari tenggelamnya sawah akibat PLTA Larona (1979), berlanjut ke migrasi warga membuka kebun lada di Tanamalia (1980-an–2000-an), dan kini berhadapan dengan rencana eksplorasi nikel PT Vale (2023–sekarang).
2. Nilai ekonomi kawasan yang disengketakan sangat besar bagi kedua belah pihak. Aktivitas pertanian lada bernilai ekonomi total sekitar Rp3,6 triliun/tahun bagi ribuan keluarga, sementara Vale menargetkan operasi tambang mulai 2029–2031.
3. Terdapat sumber yang saling bertentangan soal ada-tidaknya intimidasi/pelanggaran HAM oleh PT Vale — sebagian laporan aktivis menyebut adanya intimidasi aparat dan perusahaan, sementara investigasi independen oleh Perkumpulan Telapak (Mei–Juni 2024) tidak menemukan bukti kekerasan, pengusiran, atau penyerobotan lahan oleh Vale.
4. Konflik ini juga menjadi komoditas politik lokal, terlihat dari kemenangan pasangan bupati Irwan Bachri Syam–Puspawati Husler pada Pilkada 2024 yang mengangkat isu pembelaan petani Tanamalia, namun kewenangan penyelesaian faktual berada di tangan pemerintah pusat.

5. Beberapa klaim spesifik dari satu sumber media (soal operasi penangkapan petani oleh Balai Gakkum KLHK pada pertengahan 2026) belum berhasil diverifikasi secara independen dalam penelusuran ini dan perlu dicermati secara hati-hati.

1. LATAR BELAKANG HISTORIS: DUA GELOMBANG KEHILANGAN RUANG HIDUP

1.1 Gelombang Pertama — Tenggelamnya Sawah oleh PLTA Larona (1979)

PT Inco (kini PT Vale Indonesia Tbk) membangun sistem PLTA Larona untuk memasok energi bagi smelter nikel di Sorowako. Sistem ini mengatur debit air dari tiga danau (Matano, Mahalona, dan Towuti). Perubahan tata air yang menyertai pengoperasian sistem ini menyebabkan permukaan Danau Towuti naik dan merendam sawah-sawah produktif milik masyarakat di Desa Loeha, Tokalimbo, dan Bantilang, Kecamatan Towuti.

Dampak ini diakui dan didokumentasikan pemerintah daerah. Pemkab Luwu Timur membentuk Tim Terpadu penanganan sengketa lahan tenggelam melalui Keputusan Bupati Nomor 142/VI/Tahun 2015, yang melibatkan kepala desa dari ketiga desa terdampak. Proses ini akhirnya menghasilkan Berita Acara Penyelesaian Tuntas Pelaksanaan Tanggung Jawab PT Vale Indonesia yang ditandatangani di Sorowako pada 26 Maret 2019, berisi komitmen kompensasi berupa pencetakan sawah baru seluas 447,5 hektare di tiga desa tersebut.

Status verifikasi: Klaim ini terkonfirmasi oleh dua sumber independen (Kojam.id yang mengutip dokumen resmi Sekretariat Negara, dan pemberitaan Sambar.id edisi September 2026) — kredibilitas tinggi.

1.2 Janji Kompensasi yang Macet dan Migrasi ke Tanamalia

Memasuki 2026, realisasi fisik pencetakan sawah pengganti dilaporkan masih macet, terkendala status lahan yang belum *clean and clear* dari kawasan hutan lindung serta sulitnya membangun infrastruktur irigasi di bentang alam yang telah berubah. Akibatnya, sejak era 1980-an dan berkembang masif pasca-2000, warga beralih membuka lahan di perbukitan Tanamalia (pegunungan Lumereo-Lengkona) untuk budidaya lada — komoditas yang kemudian menjadi tulang punggung ekonomi baru masyarakat Loeha Raya.

Catatan kehati-hatian: Narasi sebab-akibat langsung antara "kegagalan realisasi sawah pengganti" dan "migrasi ke Tanamalia" berasal dari satu sumber media (Okeline.com) yang framing-nya cukup naratif/advokatif. Fakta dasarnya (janji 2019

dan realisasi yang tertunda hingga 2026) terkonfirmasi oleh sumber independen lain, namun penyusunan hubungan kausalnya sebagai motif tunggal migrasi patut dibaca sebagai satu interpretasi, bukan fakta tunggal yang telah diverifikasi forensik.

2. PROFIL KAWASAN DAN DATA SOSIAL-EKONOMI

Aspek	Data
Lokasi	Pegunungan Lumereo-Lengkona, Blok Tanamalia, Kec. Towuti, Kab. Luwu Timur
Komposisi lahan	Kawasan hutan 53%, perkebunan lada 9%, konsesi PT Vale 38%
Luas kebun lada eksisting	3.654–4.239,8 hektare (dua sumber kajian WALHI Sulsel dengan angka sedikit berbeda)
Jumlah petani lada	± 3.342 petani
Buruh tani	10.026 orang
Produksi lada	± 24.544 ton/tahun
Nilai Ekonomi Total (TEV) kawasan	± Rp3,6 triliun/tahun (WALHI Sulsel, 2023)
Nilai perkebunan lada saja	± Rp1,1 triliun/tahun
Dasar hukum operasi Vale	IUPK + PPKH Nomor 885 Tahun 2025
Target operasi tambang	2029–2031 (masih tahap eksplorasi/studi detail)
Lahan tanpa izin (klaim internal Vale)	2.500 hektare, sebagian dikerjakan "orang luar"

Kawasan ini juga menjadi *buffer zone* hutan hujan bagi Danau Lantua dan berbatasan dengan ekosistem konservasi Danau Towuti, dengan puluhan mata air dan tujuh sungai yang mengalir ke danau tersebut — menjadikan dimensi ekologis sama pentingnya dengan dimensi ekonomi dalam konflik ini.

3. KRONOLOGI KONFLIK

Tahun	Peristiwa
1979	PT Inco meresmikan PLTA Larona; luapan Danau Towuti merendam sawah di Loeha, Tokalimbo, Bantilang
1980-an–2000-an	Warga bermigrasi membuka kebun lada di perbukitan Tanamalia; berkembang masif pasca-2000
2015	Pemkab Luwu Timur membentuk Tim Terpadu penanganan sengketa lahan tenggelam (SK Bupati No. 142/VI/2015)

26 Maret 2019	Kesepakatan tertulis kompensasi cetak sawah baru 447,5 ha ditandatangani PT Vale dan Pemkab
2023 (pertengahan)	Aktivitas eksplorasi/pembukaan jalan mulai memasuki kawasan (disebut wilayah Barung Lemo dalam satu sumber)
September 2023	Vale melaporkan temuan 2.500 ha lahan "tanpa izin"; sosialisasi dasar hukum PPKH kepada warga
Akhir September 2023	WALHI Sulsel merilis kajian valuasi ekonomi kawasan Tanamalia senilai Rp3,6 triliun/tahun
29 Agustus 2023	FoE Jepang merilis laporan dugaan pelanggaran terkait aktivitas Vale di Blok Tanamalia
Maret 2024	Ketegangan memanas; Asosiasi Petani Lada Loeha Raya membantah klaim Vale soal kesepakatan penambangan
Mei–Juni 2024	Perkumpulan Telapak melakukan investigasi independen; tidak menemukan bukti perampasan lahan, kekerasan, atau intimidasi aparat terhadap petani
Juli 2024	Aksi unjuk rasa warga dan WALHI Sulsel di kantor Vale, Makassar, menuntut penghentian eksplorasi
Februari 2025	Isu ekspansi tambang dibahas antara DPRD Luwu Timur dan Kementerian Kehutanan
November 2024–Februari 2025	Ibas–Puspa memenangkan Pilkada Luwu Timur dengan 88.748 suara, mengangkat isu pembelaan petani Tanamalia sebagai bagian kampanye; dilantik Februari 2025
Juli 2025	Bupati Ibas meninjau langsung kebun lada Loeha, menjanjikan "solusi kolaboratif"
13 Agustus 2026	PT Vale menyatakan target operasi Tanamalia 2029–2031, masih tahap pendetailan eksplorasi
Pertengahan 2026	Disebutkan adanya operasi Balai Gakkum KLHK dan penangkapan sejumlah petani atas tuduhan perambahan di Tanamalia

4. VERIFIKASI SILANG: DUA NARASI YANG BERTOLAK BELAKANG

Salah satu temuan terpenting dari penelusuran ini adalah **adanya dua narasi yang saling bertentangan** mengenai perlakuan PT Vale terhadap petani, yang penting untuk kajian yang berimbang:

Narasi A — Advokasi/ Aktivis (WALHI Sulsel, FoE Jepang, media advokatif):

- Menyebut adanya ancaman ekspansi tambang terhadap kebun lada rakyat
- Melaporkan intimidasi dari aparat kepolisian dan pihak perusahaan terhadap warga yang mempertahankan lahan
- Menuduh minimnya konsultasi partisipatif sebelum eksplorasi
- Satu artikel (*Okeline.com*) bahkan menyebut adanya "kriminalisasi" dan operasi Balai Gakkum KLHK yang menangkap petani pada 2026

Narasi B — Investigasi Independen (Perkumpulan Telapak):

- Berdasarkan kajian lapangan Mei–Juni 2024, tidak ditemukan satu pun kasus perkebunan lada warga yang diserobot PT Vale
- Tidak ditemukan rekaman/catatan kekerasan, pemaksaan, pengusiran, atau peringatan pengosongan terhadap warga oleh PTVI
- Tidak ditemukan konsentrasi aparat keamanan (TNI/Polri) di desa-desa lingkaran tambang atau di lokasi Blok Tanamalia

Implikasi bagi kajian ini: Klaim soal *skala ancaman fisik/ represi* terhadap petani tidak dapat dianggap sebagai fakta tunggal yang disepakati semua pihak. Yang dapat dipastikan secara lebih solid adalah **fakta tumpang tindih ruang** (hutan lindung vs. kebun rakyat vs. konsesi tambang) dan **ketegangan klaim status hukum lahan** — sementara klaim soal intimidasi, kriminalisasi, dan kekerasan aparat masih menjadi wilayah yang diperdebatkan dan perlu verifikasi lapangan lebih lanjut oleh pihak yang independen dan berwenang (Komnas HAM, misalnya), bukan disimpulkan dari satu sisi narasi saja.

5. DIMENSI POLITIK LOKAL

Isu Tanamalia menjadi salah satu isu sentral Pilkada Luwu Timur 2024. Pasangan penantang Irwan Bachri Syam (mantan Wakil Bupati 2016–2021 dan sempat menjabat Plt. Bupati) berpasangan dengan Puspawati Husler mengangkat janji membela petani lada dari ekspansi tambang, dan berhasil mengalahkan petahana dengan **88.748 suara**.

Namun setelah dilantik Februari 2025, kewenangan bupati terbatas karena IPPKH dan regulasi pertambangan nikel sepenuhnya berada di ranah pemerintah pusat (Kementerian ESDM dan KLHK), bukan pemerintah daerah. Ini menciptakan kesenjangan antara janji politik lokal dan kapasitas eksekusi riil — sebuah pola umum dalam konflik agraria berbasis sumber daya strategis nasional di Indonesia, di mana kepentingan ekstraktif skala nasional/investasi sering kali mengalahkan kewenangan pemerintah daerah.

6. ANALISIS AKAR KONFLIK

6.1 Tumpang Tindih Ruang dan Rezim Hukum yang Berbeda

Kawasan yang sama diklaim sah secara hukum oleh tiga rezim berbeda: kawasan hutan negara (kehutanan), konsesi tambang (pertambangan/PPKH), dan penguasaan *de facto* masyarakat (agraria/sosial). Ketiganya tidak pernah ditata ulang secara partisipatif dan disepakati bersama.

6.2 Pola "Dispossession Berulang" (Penggusuran Berlapis)

Ini bukan konflik tunggal, melainkan sebuah rangkaian yang dimulai dari kehilangan sawah akibat PLTA (1979) → janji kompensasi yang tak kunjung tuntas (2019–2026) → migrasi ke lahan hutan untuk bertahan hidup → kini terancam kehilangan ruang hidup kedua kalinya akibat ekspansi tambang oleh entitas korporasi yang secara historis sama. Pola ini menjelaskan mengapa resistensi warga begitu kuat: bagi mereka, ini bukan sekadar sengketa lahan baru, melainkan pengulangan sejarah.

6.3 Skala Ekonomi yang Sama-sama Besar di Kedua Sisi

Nilai ekonomi kebun lada (Rp1,1–3,6 triliun/tahun, menopang belasan ribu keluarga) berhadapan dengan proyek tambang nikel strategis nasional dalam agenda hilirisasi. Ketika dua kepentingan besar bertemu di ruang yang sama, negosiasi menjadi jauh lebih sulit dibanding sekadar sengketa lahan skala kecil.

6.4 Legitimasi Historis vs Legalitas Formal

Penguasaan lahan warga bersifat *de facto* dan berbasis sejarah panjang (bukan sekadar perambahan oportunistik semata, meski Vale mencatat sebagian pembukaan lahan baru oleh "orang luar" yang memang patut dibedakan dari petani lama). Sementara itu, negara memberi legitimasi formal kepada korporasi lewat izin kehutanan dan pertambangan. Dua kerangka legitimasi ini tidak otomatis saling mengakui.

6.5 Sengketa Fakta Lapangan yang Belum Tuntas

Sebagaimana ditunjukkan pada Bagian 4, bahkan fakta dasar soal ada-tidaknya intimidasi masih diperdebatkan. Ketidakjelasan ini sendiri menjadi bagian dari akar konflik — tanpa fakta yang disepakati bersama, ruang dialog sulit dibangun karena kedua pihak berangkat dari premis realitas yang berbeda.

6.6 Keterbatasan Kewenangan Pemerintah Daerah

Karena IPPKH dan izin tambang berada di ranah pusat, pemerintah daerah (termasuk bupati terpilih atas janji membela petani) tidak memiliki instrumen kebijakan yang cukup untuk menyelesaikan akar sengketa — menciptakan jarak antara aspirasi politik lokal dan kapasitas struktural penyelesaian.

7. OPSI/SKEMA PENYELESAIAN YANG DIUSULKAN

Berdasarkan kajian The Sawerigading Institute yang merujuk data WALHI Sulsel, berikut tiga skema yang ditawarkan sebagai jalan keluar konflik agraria di Tanamalia:

- Skema Enclave Perkebunan Lada (Zona Perlindungan Permanen) — mengeluarkan $\pm$ 4.239 hektare kebun produktif dari wilayah operasional tambang, dilindungi melalui skema Perhutanan Sosial atau Reforma Agraria, sementara korporasi tetap menambang di zona yang layak secara teknis.
- Community Equity Participation (Saham/Kemitraan Kolektif Warga) — mengubah pola CSR karitatif menjadi kemitraan struktural, dengan sebagian saham/keuntungan dialokasikan ke kelembagaan kolektif warga (BUMDes Bersama/Koperasi), meniru model di Kanada dan Australia.
- Mekanisme Pelepasan Bertahap (Phased Release) — perusahaan hanya menguasai area yang benar-benar siap ditambang; lahan lain tetap dikelola warga secara koeksistensi, dan pascatambang direhabilitasi serta dikembalikan ke warga.

Sejalan dengan ini, pakar ekologi politik IPB, Soeryo Adiwibowo, menekankan bahwa penyelesaian konflik tenurial semacam ini membutuhkan pendekatan gabungan, termasuk dialog, kejujuran dari kedua pihak, pemetaan akar masalah bersama, mediasi pemerintah, dan kepastian hukum — bukan pendekatan legal-formal atau penegakan hukum semata.

8. KESIMPULAN

Konflik Tanamalia adalah konflik tenurial struktural dan berlapis sejarah, bukan sekadar sengketa lahan antara satu perusahaan dan sekelompok petani. Ia mewarisi luka lama dari pembangunan PLTA Larona 1979 yang belum sepenuhnya dipulihkan,

diperparah oleh tumpang tindih rezim hukum (hutan–tambang–agraria rakyat), skala ekonomi yang sama-sama besar di kedua sisi, serta kewenangan pemerintah daerah yang terbatas di hadapan otoritas pusat.

Yang membedakan kajian ini dari sekadar ringkasan berita adalah penekanan pada ketidaksepakatan fakta antara pihak-pihak yang terlibat — *kebususny soal ada-tidaknya represi dan intimidasi* — yang menunjukkan bahwa langkah pertama menuju resolusi bukanlah memutuskan siapa yang benar, melainkan membangun mekanisme pemetaan fakta bersama yang dipercaya semua pihak (independen, transparan, melibatkan pemerintah, korporasi, masyarakat sipil, dan perwakilan petani) sebelum masuk ke negosiasi skema penyelesaian jangka panjang.

CATATAN METODOLOGIS DAN KETERBATASAN

- Dokumen ini disusun dari penelusuran sumber terbuka (media daring, situs lembaga think-tank, dokumen resmi yang dikutip media, dan repositori akademik) pada September 2026.
- Sejumlah klaim numerik (luas lahan, jumlah petani) bervariasi sedikit antar-sumber karena perbedaan waktu survei dan metodologi — kajian ini menyajikan rentang, bukan angka tunggal, di mana relevan.

DAFTAR REFERENSI

1. SINDOnews — "Konflik Tenurial Blok Tanamalia, Pakar Dorong Dialog dan Kepastian Hukum"
2. Media Indonesia — "Butuh Ruang Dialog dan Kepastian Hukum untuk Penyelesaian Blok Tanamalia"
3. Rakyatku.com — "Presidium DKN Desak Pemerintah Atasi Konflik Tenurial di Tanamalia Luwu Timur"
4. LBH Makassar — "Wujudkan Pembaruan Agraria bagi Petani, Nelayan dan Masyarakat Miskin Kota..."
5. iGlobalNews — "Tak Ada Titik Temu Konflik Agraria di Jalur Formal: Petani Laoli Mengadu ke Kedatuan Luwu"
6. The Sawerigading Institute (TSI) — situs dan judul kajian yang dirujuk media
7. Luwurrayapos.com — "Semakin Panas Sengketa Blok Tanamalia Antara Petani Lada dengan PT Vale"
8. Newsurban.id — "Konflik Tanamalia, Petani Lada Minta PT Vale Tidak Membuat Berita Bohong"

9. Sambar.id — "Bos Vale Beberkan Rencana Tambang Tanamalia..." dan "Petani Lutim Menolak Punah untuk Kedua Kalinya di Balik Bayangan PT. Vale"
10. Mongabay Indonesia — beberapa artikel (2019, 2023, 2024) soal WALHI Sulsel, valuasi ekonomi Tanamalia, dan aksi warga
11. Kontan.co.id / Momsmoney.kontan.co.id — soal temuan lahan tanpa izin dan hasil investigasi Telapak
12. Kojam.id — dokumen Berita Acara Kompensasi Sawah 26 Maret 2019
13. Katadata.co.id — "Vale Targetkan Proyek Tanamalia Beroperasi Paling Cepat 2029"
14. detikSulsel — pemberitaan Pilkada Luwu Timur 2024 dan hasil suara Ibas-Puspa
15. Repository Universitas Hasanuddin — kajian akademik dinamika politik Pilkada Luwu Timur
16. e-PPID Pemkab Luwu Timur — profil Bupati Irwan Bachri Syam
17. Okeline.com — "Konflik Agraria Tanamalia Luwu Timur dan Perjuangan Petani Menolak Punah untuk Kedua Kalinya"
18. CNN Indonesia / Bisnis.com / Fortune Indonesia — soal kebocoran pipa minyak Vale 2025 (konteks tambahan hubungan Vale-warga)
19. Wikipedia (ID/EN) — data geografis Danau Towuti